

HASIL PENELITIAN**PENGARUH PEMBANGUNAN KOTA TERHADAP BEBAN KERJA PEREMPUAN MISKIN DI KOTA JAKARTA**

Veronica A. Kumurur

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado

***Abstract.** Development is done on the ecosystem of Jakarta generate increased economic growth with enough significant of years. However, economic growth cannot be enjoyed by the whole community of Jakarta. Urban development not only generate economic growth and environmental degradation, such as air pollution, pollution of river water and ground water. Both of these constitute a social gap for the city of Jakarta. Where these gaps become a heavy burden for the poor city of Jakarta. Heaviness of the same was not felt by the poor men and poor women of Jakarta. Women who have experienced poverty in the city of Jakarta, received a heavier burden than men. These burdens perceived internally and externally. Internal burden is the burden that is felt in the lives of female domestic shutter and external load is felt in the public shutter poor women. This burden is also due to women living in poverty will try to keep life in many ways. Poor women must work to maintain family life and himself, though the choice is very limited work. Poor women are important actors in sustainable urban development through make community sustain. As a result of job choices, poor women are behind the effect and become input (input) for the balance of the ecosystem of Jakarta. If the input quality of the ecosystem conditions will lead to a balanced process that ultimately sustainable. This sustainability, will be transmitted to the sustainability of ecosystems nationally, regionally and globally.*

***Keywords.** City Development, work burden, double burden, women poor*

PENDAHULUAN

Pembangunan saat ini, mengandung unsur hakiki, yaitu membangun manusia jasmaniah dan rohaniyah serta merubah nasib manusia agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Salim dalam Soetarjono 1985). Sehingga, pembangunan merupakan suatu proses dalam keadaan suatu sistem (Teune 1988:39). Di mana, dalam proses ini, pembangunan tidak hanya suatu berhubungan dengan sistem pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga berhubungan dengan sistem perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dunia.

Pada kenyataannya, pembangunan yang merupakan hasil interaksi dari subsistem sosial dan ekonomi, subsistem lingkungan buatan dan subsistem alam dalam suatu ekosistem perkotaan,

melahirkan kondisi yang ambigu dalam suatu masyarakat. Disatu pihak pembangunan kota menjadi kebanggaan masyarakat karena menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sedang di pihak lain merupakan beban kehidupan bagi kelompok masyarakat tertentu, yaitu: masyarakat miskin kota. Kenyataan ini, sedang terjadi pada masyarakat kota Jakarta.

Kenyataan yang lain, bahwa pembangunan kota Jakarta masih belum dapat menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat kota. Justru, saat ini, penurunan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin kota Jakarta sedang terjadi. Ini diperlihatkan melalui penggusuran lahan hunian masyarakat miskin kota dalam rangka penataan kota Jakarta. Dalam RUTRW Jakarta 2010, dialokasikan lahan untuk permukiman seluas 37,21 % dari luas Kota Jakarta atau 25,477,68 ha. Padahal pada

tahun 2001, luas permukiman di Kota Jakarta adalah 43,475,09 ha (Jakarta dalam angka 2001), maka telah terjadi pengurangan lahan permukiman. Jika diasumsikan yang digusur adalah permukiman dengan kepadatan 300 orang per hektar (permukiman kumuh), maka yang harus digusur adalah 5,4 juta orang dari masyarakat strata bawah. Ini berarti penataan kota justru menggusur masyarakat miskin kota, yang akhirnya masyarakat miskin kota akan bertambah miskin. Hal ini di dukung oleh data-data yang diperoleh INFID (2005) bahwa upaya-upaya penggusuran masyarakat miskin telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta sepanjang tahun 2001-2003.

Dari data *United Nation* (1997) dikemukakan bahwa situasi kemiskinan yang paling hebat terjadi di negara-negara berkembang, di mana ada sekitar 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70 % di antaranya adalah kaum perempuan. Kondisi ini didukung data yang dikemukakan ILO (2004), bahwa terdapat 550 juta pekerja miskin di dunia, atau orang yang tidak mampu mengangkat dirinya dan keluarga mereka berpenghasilan di atas US\$1 per hari, dan sekitar 330 juta atau 60 persen adalah perempuan. Kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50 persen lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama (Cahyono 2005). Ternyata kemiskinan tidak lepas hanya disebabkan ketidakadilan menanggung beban kekurangan ekonomi bagi perempuan. Tetapi juga terjadi penindasan, perampasan hak, yang melahirkan penderitaan, kesedihan, dan luka yang mendalam. Kajian yang dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di bawah 18

tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta (TEMPO *Interaktif* 12 Juni 2003). Ditemukan bahwa satu dari enam perempuan mengalami perlakuan kejam, dan kekerasan, ini banyak terjadi di negara miskin (Suara Pembaharuan, 2 Desember 2005).

Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan memahami kondisi kehidupan kemiskinan perempuan di kota Jakarta, di mana perempuan lebih berat memikul beban kemiskinan dari pada laki-laki akibat pembangunan kota dan tidak mampu keluar dari kondisi kehidupan miskin tersebut.

PEMBANGUNAN KOTA

Pembangunan adalah membangun insani. Oleh karena itu, manusia menjadi faktor utama, baik sebagai subyek maupun obyek, sebab pada dasarnya manusia adalah faktor ekologi utama (Soetaryono 1985:101). Pembangunan di negara-negara berkembang, bukan lagi hanya meningkatkan pendapatan nasional, tidak lagi semata-mata menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa, tetapi pembangunan mengandung unsur hakiki, yaitu membangun manusia jasmaniah dan rohaniah serta merubah nasib manusia agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Salim *dalam* Soetarjono 1985).

Menurut Teune (1988:39-40), bahwa pembangunan diakibatkan oleh beberapa dinamika dan perubahan secara bersama-sama. Menurut Todaro (1994) bahwa pembangunan adalah suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti: percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Menurut Keats (2004) secara khusus pembangunan yang bersifat multidimensional memiliki arti dimensi yang berbeda-beda di belahan bumi yang memiliki negara-negara maju dengan di

belahan bumi yang masih memiliki negara-negara yang belum dan sedang berkembang. Namun, sebagian besar dimensi pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai suatu peningkatan gaya hidup masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, pendapatan, pengembangan ketrampilan dan ketenaga-kerjaan (Keats 2004).

Menurut pemahaman negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Hakikatnya, pembangunan kota adalah hasil dari proses interaksi yang terjadi secara terus menerus antara sistem pembangunan ekonomi, sistem pembangunan pendidikan, sistem pembangunan kesehatan, sistem pembangunan ketenagakerjaan serta subsistem lingkungan alam di dalam ekosistem perkotaan. Hasil dari proses interaksi tersebut secara signifikan memengaruhi kondisi kemiskinan perempuan kota Jakarta.

PARADIGMA PEMBAGIAN KERJA DALAM KELUARGA

Pola kerja patriarki ini menempatkan perempuan sebagai ibu, perempuan yang menjaga rumah dan anak-anak tanpa pertolongan dari laki-laki, dengan resiko perempuan kehilangan sumber ekonominya sendiri dan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan "feminisasi kemiskinan" di mana perempuan biasanya mendapatkan upah/pendapatan yang lebih rendah dari pada laki-laki.

Keluarga merupakan salah satu bagian dari berbagai subsistem dalam masyarakat (Megawangi 1999:66). Menurut

Megawangi, keluarga dalam subsistem masyarakat tidak akan lepas dari interaksinya dengan subsistem-subsistem lainnya yang ada dalam masyarakat. Setiap keluarga (keluarga inti atau nuklir), memiliki tugas-tugas sebagaimana sistem sosial, yaitu: menjalankan tugas-tugas, pencapaian tujuan, integrasi dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga.

Merupakan salah satu kontribusi utama dalam teori feminis bahwa pembagian peran secara seksual dan pengsubordinasian perempuan oleh laki-laki adalah dua hal yang memiliki keterkaitan (Agger 2008:207). Menurut Agger, pembagian kerja secara seksual telah membantu menjelaskan bagaimana subordinasi perempuan di pasar kerja, politik, dan budaya mencerminkan dan memperkuat subordinasi perempuan di dalam rumah tangga. Masih dalam catatan Agger, bahwa akibat pembagian kerja berdasarkan seks telah menciptakan obyektivitas perempuan oleh laki-laki. Di mana secara objek bagi laki-laki di keluarga, yang bertindak baik sebagai pasangan pembantu maupun pasangan seksual, perempuan diobjektivisasikan di wilayah publik.

Pembagian kerja secara seksual berbeda-beda pada setiap masyarakat (Widanti 2005:410). Ada yang menuliskan bahwa, pada masyarakat subsistensi sebagai masyarakat yang harmonis tidak berlapis-lapis dan perempuan mempunyai wewenang tinggi. Tetapi ada pula yang menggambarkan bahwa dalam suatu masyarakat, posisi perempuan mendekati budak. Namun, menurut catatan Widanti bahwa pola umum pembagian kerja, sebagai berikut:

- 1) Pada masyarakat berburu: perempuan mengumpulkan makanan dan binatang kecil, sedangkan laki-laki berburu.
- 2) Pada masyarakat prapitalis: perempuan tersubordinasi oleh kelas-kelas yang dominan, tetapi dalam lingkungan keluarga, di mana produk dan nilai pakai dibuat, perempuan tetap dapat mempertahankan wewenang

3) Pada masyarakat kapitalis: terutama di dunia ketiga, pada awal industrialisasi, di mana produk industri banyak menyerap tenaga kerja dan perempuan di tarik dari sektor domestik memasuki sektor industri. Jenis-jenis pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan domestik yang telah disosialisasikan dalam keluarga seperti menjahit, melayani, memasak, dan lain-lain. Setelah industrialisasi intensif modal, maka lebih banyak laki-laki direkrut dalam pabrik. Namun, untuk industri yang bertujuan ekspor, pekerja perempuan tidak diganti dengan mesin atau pekerja laki-laki, sehingga buruh perempuan dengan upah murah, pekerjaan ringan dan tidak berkembang. Sering pula mendapatkan perlakuan yang tidak bermartabat oleh atasan atau buruh laki-laki. Disini ketidakadilan jender berakibat buruh perempuan diinferiorkan, dan dengan demikian patriarki sebagai sistem sosial bergabung dengan kapitalisme sebagai sistem ekonomi.

Menurut Agger (2008), pembagian kerja laki-laki dan perempuan sesungguhnya didasari oleh ideologi patriarki atau supremasi laki-laki yang ada di wilayah privat/domestik maupun publik. Chodorow yang dikutip Agger (2008), menganggap keluarga sebagai satu tempat pertarungan di mana pembagian kerja secara seksual melemahkan dan merugikan perempuan dan mereproduksi secara ketat pemisahan peran jender antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan tersebut, di dukung Agger (2008), bahwa pembagian kerja secara seksual dalam rumah tangga dan dunia kerja menunjukkan secara empirik bahwa pembedaan peran jender dalam keluarga membentuk pola bagi ketimpangan jender di dunia kerja.

Pola pembagian kerja pada masyarakat pra-kapitalis sampai dengan kapitalis, yang meminggirkan kepentingan hakiki perempuan sebagai manusia, sampai

saat ini masih dilestarikan. Pelestarian pola pembagian kerja yang bias jender dan merugikan perempuan baik di ranah domestik/privat maupun ranah publik, akibat dari pengasuhan orang tua dari generasi ke generasi (Widanti 2005:181). Ini merupakan peran sosial yang ditentukan, di mana status dan peran adalah pengakuan yang diberikan oleh masyarakat bagi kita, terlepas dari kualitas individu maupun usaha-usahnya kita dan status dan peran yang kita perjuangkan melalui usaha-usaha kita sendiri (Young & Mack dalam Horton & Hunt 1984:121)

PARADIGMA BEBAN KERJA (DOUBLE BURDEN)

Akibat dari peran sosial yang ditentukan, menurut Clementine Dehwe dalam esainya "*double burden*" yang dipublikasi oleh www.ufa.se, bahwa setiap perempuan di seluruh dunia memiliki banyak pekerjaan. Hingga kini, pekerjaan perempuan tidak akan pernah selesai, dan secara signifikan, waktu kerja perempuan lebih banyak dibandingkan dengan waktu kerja laki-laki. Beban ganda atau "*double burden*" menurut pengertian yang diambil dari www.psychology.wikia.com, adalah suatu yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Eropah Barat dan USA yang merujuk pada beban kerja perempuan dan laki-laki untuk mencari uang (mendapatkan upah), tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk kerja rumah tangga yang berhubungan dengan orang yang tidak dibayar (tidak diupah).

Menurut Ross Pole yang dikutip oleh Widanti (2005), dikotomi privat (domestik) dan publik, betina dan jantan adalah hasil dari sejarah moderen. Di mana dengan munculnya kapitalisme, maka distribusi produk sosial ditentukan oleh bekerjanya pasar dan bukan oleh tradisi, status atau kewajiban dalam keluarga. Sehingga, konsep kerja diartikan sebagai kerja upahan di luar keluarga dan di dalam pabrik. Dari sini pula menurut Pole, terjadi

dikotomi kerja produktif (berupah) dan kerja reproduktif (tidak berupah). Padahal, menurut Widanti (2005) bahwa belum tentu kerja rumah menjadi kerja reproduktif dan kerja di luar rumah menjadi kerja produktif. Widanti mencontohkan, seperti pekerjaan-pekerjaan ibu-ibu PKK dan pekerjaan buruh perempuan yang memasak makanan untuk dimakan dan makanan untuk dijual di pabrik.

Menurut Oakley yang dikutip oleh Ollenburger & Moore (2002:119), pekerjaan rumah tangga yang didominasi perempuan memerlukan waktu yang tinggi, sekitar 30-60 jam per minggu dan tidak dibayar (menjadi 99 jam per minggu jika memasukkan waktu pengasuhan anak). Menurut Walker & Woods dalam Ollenburger & Moore (2002), pada pasangan yang menikah, mayoritas penggunaan waktu yang sangat banyak dalam pekerjaan rumah tangga adalah sang istri, yaitu sekitar 70%.

Bagi keluarga buruh, yang juga termasuk keluarga miskin, yang diperburuk dengan ketiadaan uang, perlindungan harian yang buruk, ketidakmapanan ekonomi, serta kurangnya otonomi pada pekerjaan-pekerjaan upahannya, maka setiap pasangan harus saling menyesuaikan tugas-tugasnya masing-masing (Hochschild dalam Ollenburger & Moore 2002). Disinilah, menurut Widanti (2005:217) bahwa beban kerja perempuan lebih berat dari pada laki-laki yang disebabkan oleh pelabelan perempuan sebagai makhluk domestik. Di mana, pada kehidupan keluarga buruh, perempuan tidak hanya bekerja di ranah domestik, tetapi juga dituntut untuk bekerja di ranah publik, karena penghasilan tidak cukup. Pendapat ini didukung pula oleh Hochschild (Ollenburger & Moore 2002:121), bahwa perempuan juga harus bekerja untuk mendapatkan upah karena laki-laki pasangannya merasa tidak cukup membiayai kehidupan keluarganya.

Akibat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, maka perempuan diwajibkan melakukan tugas-tugas domestik/rumah

tangga (seperti: mencuci piring, mencuci pakaian, menjaga anak, membersihkan rumah). Sementara itu, laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah bagi keluarga (tugas-tugas publik). Tugas ini akan menjadi berat terjadi pada keluarga miskin yang harus mempertahankan kehidupan di kota. Perempuan-perempuan miskin tidak hanya melakukan tugas wajibnya di ranah domestik, tetapi juga mereka harus bekerja di ranah publik untuk menambah biaya kehidupan keluarganya. Hal ini juga dikemukakan oleh Mead (1957) dalam Sajogjo (1983) bahwa beban berat masih pada keluarga tidak mampu, karena untuk semua pekerjaan harus dilakukannya sendiri. Menurut laporan Sari (2004) bahwa, untuk kerja penuh waktu pun (antara 35-74 jam/minggu) lebih banyak diterima oleh laki-laki (71,6%), dibanding perempuan (48%), dan mayoritas pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang panjang (di atas 75 jam/minggu) juga perempuan (44%). Tingginya jumlah perempuan yang bekerja dalam jam kerja yang panjang membuktikan bahwa perempuan harus bekerja lembur untuk menutupi/mengkompensasi upah rendah yang ia terima. Sementara, sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja penuh waktu adalah akibat keharusannya untuk mengerjakan kerja rumah tangga pada saat yang bersamaan.

Menurut data UNFPA (2002) yang dikutip dalam situs Kesrepro Dot Info (2003) bahwa perempuan di beberapa negara bekerja dengan jam kerja yang lebih lama daripada laki-laki dan kemungkinan $\frac{1}{2}$ dari jumlah waktu kerja perempuan yang dipergunakan merupakan pekerjaan yang tidak dibayar. Untuk melihat kondisi beban kerja perempuan miskin, diambil data jumlah perempuan miskin yang bekerja lebih dari 40 jam kerja dalam satu minggu. Biasanya tenaga kerja yang bekerja lebih dari 40 jam kerja adalah tenaga kerja sebagai buruh pabrik. Jika, diasumsikan jam kerja berdasarkan data dari UNFPA (2002) bahwa perempuan di beberapa negara bekerja

dengan jam kerja yang lebih lama daripada laki-laki dan kemungkinan $\frac{1}{2}$ dari jumlah waktu kerja perempuan yang dipergunakan merupakan pekerjaan yang tidak dibayar. Jadi, diasumsikan bahwa perempuan bekerja di ranah publik dan ranah domestik. Pekerjaan di ranah publik dibayar, sedangkan pekerjaan di ranah domestik tidak dibayar. Sebaliknya laki-laki, di ranah domestik sama dengan perempuan, yaitu pekerjaan di bayar, namun tidak dibebani pekerjaan domestik, jadi tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar bagi laki-laki. Jika dalam keluarga, suami dan isteri bekerja, maka istri yang bekerja di ranah publik, harus bekerja pula di ranah domestik melayani suami dan anak-anaknya. Pekerjaan tersebut tidak pernah dinilai atau dibayar, karena itu memang sudah bagian dari pekerjaan perempuan dan bukan pekerjaan laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi partisipatori. Menetapkan asumsi bahwa semua perempuan miskin kota Jakarta, memiliki kemungkinan yang sama dalam menanggung beban kehidupan akibat pembangunan kota Jakarta. Menetapkan perempuan-perempuan miskin yang menjadi target berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Sebagai pencari nafkah, kebanyakan perempuan miskin menerjunkan diri pada sektor-sektor yang marjinal misalnya, sebagai buruh pabrik, buruh cuci, pembantu rumah tangga, pedagang kecil (Westy 2008).
- b. Termasuk kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, sosial, dan penelantaran rumah tangga (berdasarkan hasil survei di Kabupaten Bandung oleh SAPA yang dikutip dalam Westy 2008).
- c. Memiliki beban kerja (*burden*) berat, yang harus ditanggung dalam kerja produktif di luar rumah, karena ia tetap

harus menjalankan berbagai kegiatan produktif di dalam rumah, seperti mencuci, memasak, serta mengasuh dan menjaga anak (Resmi Setia M.S 2003).

- d. Menggantungkan hidupnya pada usaha-usaha mikro, dan relasi kekuasaan yang menekan kelompok perempuan, di mana "kekuasaan menekan" tidak hanya datang dari laki-laki atau pada ruang domestik, tetapi penekanan terbesar justru datang dari struktur pasar (Dewayanti 2003).
- e. Bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan dan modal, seperti pedagang jalanan, dan di perdagangan jalanan ini, perempuan menempati tempat yang paling miskin (Murray 1995:53).
- f. Tidak memiliki waktu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan pada kursus-kursus menjahit, memasak yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan (Murray 1995:94).
- g. Bekerja tanpa kontrak kerja, diwajibkan bekerja pada waktu libur, dipecah apabila hamil (Murray 1995:118).
- h. Bagi perempuan muda (lajang), lebih menyukai pekerjaan dari pada uangnya. Dengan harapan ada laki-laki kaya yang akan mengawininya dan menjadikan dia kaya (Murray 1995:119).
- i. Memilih pekerjaan sebagai pelacur kelas bawah dan bekerja pada bar-bar kota Jakarta yang tidak menarik bayaran masuk, tempat-tempat minum kopi di hotel, di disko-disko pada saat "*ladies night*" atau bekerja pada kondisi yang lebih formal lagi, yaitu sebagai pelayan bar (hostes/waitress bar) (Murray 1995:125).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Kerja (*Double Burden*) Ibu Yaya sebagai Pembantu Rumah Tangga

Pekerjaan utama ibu Yaya selain sebagai ibu rumah tangga (ranah domestik), juga sebagai pencari nafkah, sebagai pembantu rumah tangga (PRT). PRT adalah

seorang yang bekerja pada ranah domestik yang diupah. Menurut teori konsumen, bahwa jasa termasuk sumberdaya yang dapat dipasarkan didalam pasar kerja. Namun, pada kenyataannya pekerjaan rumah tangga yang diidentikkan dengan kerja alamiah perempuan adalah wujud dari pembagian kerja berdasarkan gender (konstruksi sosial) dimana laki-laki diposisikan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar dan perempuan mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar.

Pekerjaan PRT dikategorisasikan sebagai pekerjaan di sektor informal, maka perlindungan terhadap mereka pun berada diluar konteks hukum perburuhan. Tugas (kerja) mereka dianggap kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi PRT dan minimnya upah yang mereka terima. Ibu Yaya bekerja sebagai pramuwisma di rumah kos "GC", sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang "ojek" yang berpangkalan di sekitar kawasan lokasi tempat tinggal keluarga Ibu Yaya (sekitar kawasan pasar Cikini Jakarta Pusat). Mencari nafkah dan mempunyai tanggungan, dua alasan utama yang membuat Ibu Yaya menjadi pembantu rumah tangga. Suami ibu Yaya tidak memiliki pekerjaan sejak di PHK tahun 2001.

Beban ganda atau "*double burden*" dapat diartikan sebagai suatu beban kerja perempuan dan laki-laki untuk mencari uang (mendapatkan upah), tetapi juga mempunyai

tanggung jawab untuk kerja rumah tangga yang berhubungan dengan orang yang tidak dibayar (tidak diupah). Fenomena beban ganda tersebut, cenderung hanya dilihat dari "sistem pengupahan" saja. Cenderung pula pada keluarga-keluarga yang mampu (kaya), di mana perempuan tidak untuk bekerja di ranah publik, tetapi hanya bekerja di ranah domestik saja.

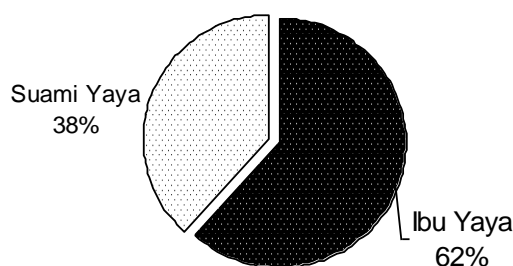
Dalam kehidupan keluarga miskin di kota Jakarta, perempuan terpaksa harus turut serta dalam bekerja di ranah publik. Sehingga beban ganda tidak hanya terbatas pada sistem pengupahan saja. Hasil analisis penelitian keluarga miskin di Jakarta, teridentifikasi fenomena beban ganda yang dialami ibu Yaya (keluarga miskin di kota Jakarta) dengan pekerjaan sebagai PRT, disebabkan dari dua faktor, yaitu:

Faktor internal

Pembagian kerja yang diukur dalam penggunaan waktu kerja (domestik dan publik) ibu Yaya dan suami. Di mana ibu Yaya lebih banyak menggunakan waktu kerja dibandingkan suami ibu Yaya. Padahal keduanya bekerja pada sektor informal (tidak menentu penghasilannya)

Faktor Ekternal

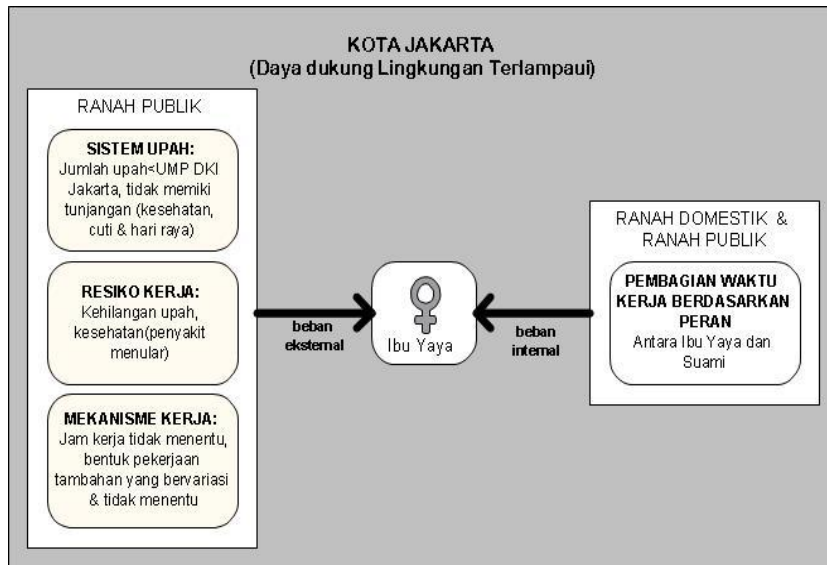
Faktor yang disebabkan oleh kegiatan yang kerja di ranah publik, seperti: sistem pengupahan, mekanisme kerja, dan resiko kerja. Sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta serta tidak adanya tunjangan kesehatan, cuti dan hari raya. Juga, mekanisme kerja, di mana jam kerja serta bentuk pekerjaan yang dikerjakan ibu Yaya. Serta resiko atas pekerjaan rumah



Gambar 1. Pembagian waktu kerja ibu Yaya dan suami

tangga yang dilakukan ibu Yaya, yang cenderung tidak menggunakan alat-alat pengaman diri (seperti: masker dan sarung tangan). Resiko kehilangan

Kedua faktor inilah secara simultan mempengaruhi kehidupan ibu Yaya, yang kemudian faktor-faktor ini menjadi suatu beban kerja ibu Yaya setiap hari (Gambar 2).



Gambar 2. Fenomena Beban Kerja (*double burden*) Ibu Yaya

upah, akibat majikan ibu Yaya yang juga penghuni kos Gc tersebut “minggat/kabur” akibat menghindari dari membayar kos. Ibu Yaya tidak memiliki waktu luang, bagi dirinya dan bagi keluarganya. Dengan demikian, ia rentan terhadap stress dan depresi akibat kelelahan.

Menurut doktor spesialis perempuan di AS Jessica Anderson yang dikutip dalam <http://indonesian.irib.ir>, bahwa salah satu faktor lain dalam menimbulkan depresi pada perempuan adalah stress dan tekanan yang dialami di luar rumah, di mana tidak adanya keseimbangan antara tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga di satu sisi dan pekerjaan di sisi lain. Kondisi ini menurut Anderson, menciptakan atmosfer buruk yang sangat buruk dan melipat gandakan stress yang dialami kaum perempuan. Anderson juga mengemukakan bahwa ketika perempuan dituntut untuk bekerja di luar rumah sama seperti laki-laki, mereka akan lebih cepat menderita depresi mengingat mereka sangat sensitif dalam menyikapi segala hal.

Analisis Beban Kerja (*Double Burden*) Ibu Tika

Ibu Tika, selain sebagai ibu rumah tangga, ibu Tika juga bekerja sebagai waitress di “EM” pub & bar di kawasan Jakarta Pusat. Ibu Tika dan suami sama-sama bekerja di ranah publik. Mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, untuk menghidupi anak-anak serta ayah dan ibu suami Tika. Dari uraian waktu kerja yang digunakan ibu Tika dan suami, diperoleh bahwa dalam 1 hari ibu Tika menggunakan waktu kerja di ranah domestik sebanyak 12 jam atau 84 jam setiap minggu. Sedangkan suami ibu Tika hanya menggunakan 35 jam dalam seminggu untuk bekerja di ranah domestik. Dari hasil observasi yang dilakukan, fenomena beban ganda (*double burden*) ibu Tika sebagai berikut:

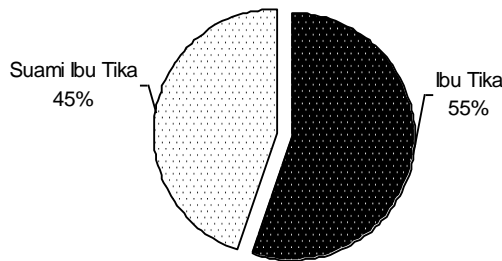
Faktor Internal

Faktor yang disebabkan oleh pembagian kerja antara ibu Tika dan suami yang diukur dari waktu kerja baik domestik dan publik. Di mana ibu Tika lebih banyak

menggunakan waktu kerja dibandingkan suami, yaitu 55% dan 45% (Gambar 3).

Hal ini terjadi, karena masih melekat pada keluarga di Indonesia bahwa seorang perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah, meskipun perempuan tersebut bekerja sebagai pencari nafkah. Pekerjaan-pekerjaan tersebut, seperti: memasak, mencuci pakaian, mengantar anak ke sekolah dan membantu anak belajar.

waitress (termasuk Ibu Tika) cenderung tidak diberikan upah. Pengupahan dengan cara sistem omset diberlakukan bagi Tika dan para perempuan pekerja pub & bar tersebut, sementara para petugas pengelola yang terdiri dari para laki-laki tidak diberlakukan sistem pengupahan yang demikian. Padahal yang menjadi bagian penting dalam bisnis pub & bar tersebut adalah para waitress, namun merekalah yang



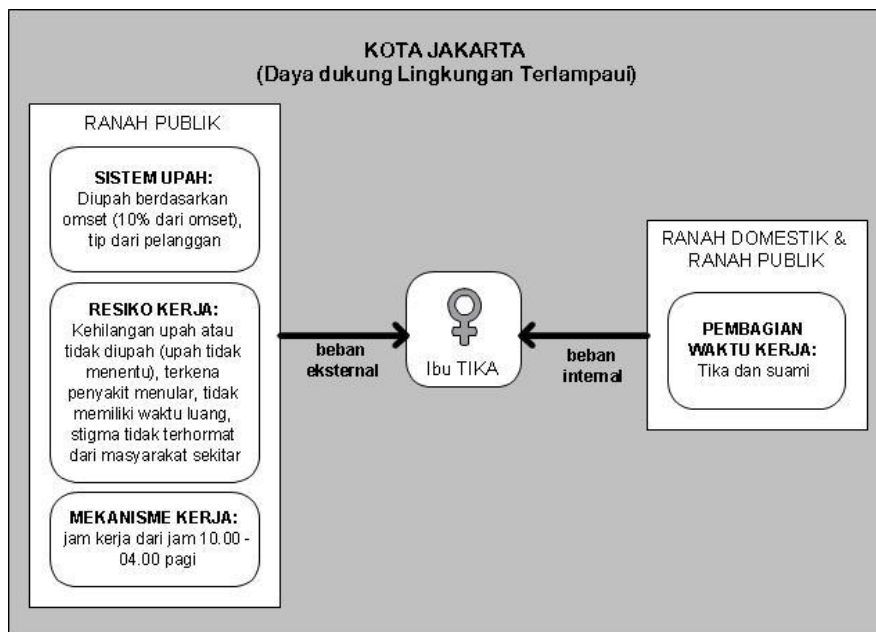
Gambar 3. Pembagian waktu kerja ibu Tika dan suami

Faktor Eksternal

Faktor yang disebabkan oleh kegiatan yang kerja ibu Tika pada ranah publik yaitu di “EM” pub & bar. Faktor-faktor eksternal tersebut, yaitu: sistem pengupahan, mekanisme kerja, dan resiko kerja. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh “EM” pub & bar, tidak memenuhi standar UMP DKI Jakarta, malahan para

memiliki upah terendah di arena bisnis ini.

Mekanisme kerja, di mana ibu Tika harus sudah “standby” untuk bekerja jam 21.00 malam hingga jam 04.00 pagi. Ibu Tika harus menemani dan melayani tamu-tamu yang menjadi pelanggan tetap maupun tamu-tamu baru bagi pub & bar tersebut. Cara kerja yang tidak membedakan laki-laki siapa yang mau dilayani atau ditemani oleh



Gambar 4. Fenomena beban kerja (double burden) ibu Tika

ibu Tika, telah menjadikan perempuan ini sebagai pelayan yang tak lagi memiliki martabat dan harga diri. Ini dilakukan agar omset Tika tercapai. Akibat atau resiko yang paling penting dari pekerjaan ini, adalah: kesehatan ibu Tika, baik dari terkena penyakit menular, juga daya tahan tubuhnya, juga resiko dilecehkan oleh setiap laki-laki yang datang serta menerima stigma negatif dari masyarakat sekitarnya sebagai perempuan pekerja dunia malam. Fenomena beban kerja ibu Tika seperti pada gambar 4.

Analisis Beban Kerja (*Double Burden*)

Ibu Ina sebagai Pedagang Kaki Lima

Ibu Ina dan suami bekerja sebagai pedagang kaki lima (PKL). Ibu Ina berdagang rokok, makanan dan minuman ringan. Mereka berdagang di ujung “gang” jalur trotoar sepanjang Jalan Wahid Hasim Jakarta Pusat dengan menggunakan gerobak yang tidak dapat dipindah-pindahkan atau permanen. Ibu Ina dan suaminya memiliki beban kerja dan waktu istirahat yang sama. Kegiatan domestik dan publik bagi keluarga ibu Ina tidak dapat dipisahkan, karena harus berlangsung secara bersama-sama dan pada lokasi yang sama, yaitu di trotoar (tepi jalan raya). Dari uraian di atas, fenomena beban kerja (*double burden*) Ibu Tika, sebagai berikut:

Faktor Internal

Fenomena yang diakibatkan oleh faktor dari dalam keluarga, yaitu: pembagian waktu kerja ibu Ina dan suami. Ibu Ina dan

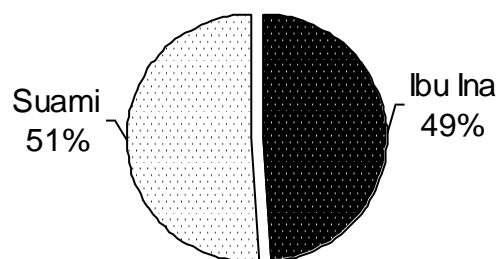
suami, keduanya memiliki waktu yang sama di ranah publik. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan sebagai PKL selain dilakukan oleh ibu Ina, suaminya juga turut bersama dalam pekerjaan tersebut.

Dari jumlah keseluruhan waktu, suami ibu Ina menggunakan waktu kerja lebih banyak dari ibu Ina, yaitu 51% dan ibu Ina 49% (Gambar 5). Namun persentase tersebut, kadang berubah-ubah, artinya, antara ibu Ina dan suami terjadi pembagian kerja yang adil dan saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain.

Faktor Eksternal

Faktor yang disebabkan oleh kegiatan yang kerja di ranah publik. Bentuk pekerjaan sebagai PKL, faktor eksternal yang menjadikan fenomena beban kerja (*double burden*) adalah: mekanisme kerja serta resiko kerja. Sistem pengupahan, tidak menjadi beban, karena PKL merupakan suatu bentuk usaha swadaya. Pencemaran udara merupakan beban bagi seluruh keluarga ibu Ina. Meskipun menjadi keseluruhan beban keluarga, namun karena peran ekpresifnya, maka ibu Ina harus bertanggungjawab secara sosial terhadap seluruh keluarganya. Di mana akibat pencemaran udara di lokasi tempat mereka berjualan, akan menyebabkan meningkatnya pengeluaran untuk biaya kesehatan bagi keluarga ini (Gambar 6).

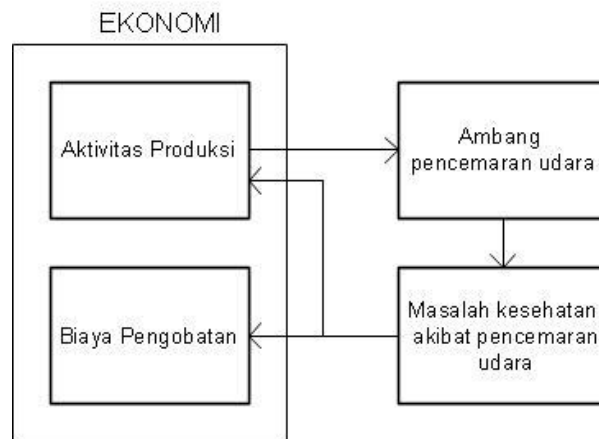
Menurut Resosudarmo (1996) bahwa pencemaran udara merupakan produk sampingan dari aktivitas produksi yang



Gambar 5. Penggunaan waktu kerja ibu Ina dan suami

menggunakan “bahan beracun.” Bahan beracun disini didefinisikan sebagai bahan masukan, yang digunakan dalam proses produksi, yang mencemari udara. Contohnya

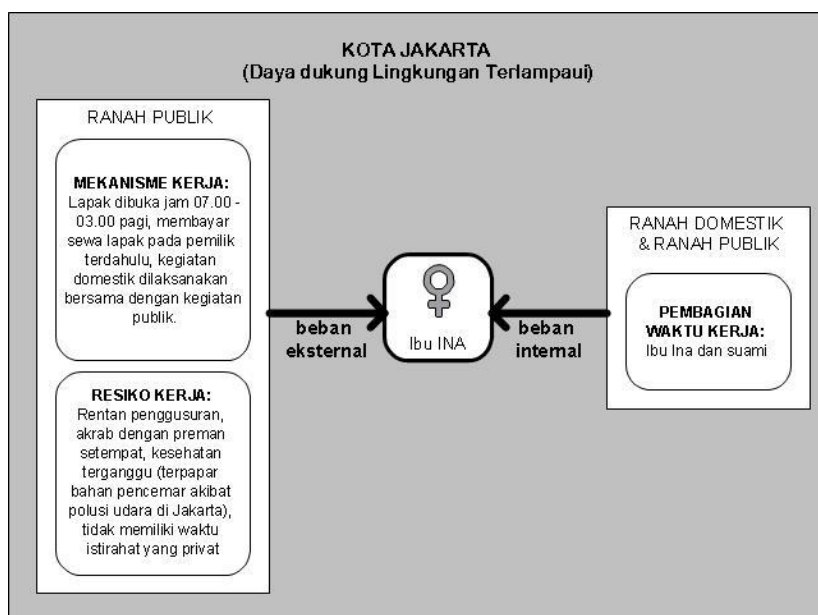
disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran udara menimbulkan biaya pada masyarakat. Tepatnya, mereka-mereka yang terkena gangguan kesehatan tersebut akan



Gambar 6. Hubungan antara Perekonomian dan Tingkat Pencemaran Udara Sumber: diadopsi dari Resosudarmo (1996)

seperti bensin dan solar. Tingkat ambang pencemaran udara yang tinggi menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Sebagai contoh, berbagai gangguan pada tenggorokan, penyakit asma, dan tekanan darah tinggi. Gangguan kesehatan yang

mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran udara akan mengurangi efektivitas kegiatan produksi. Hal ini disebabkan karena mereka-mereka yang terkena gangguan kesehatan tidak dapat



Gambar 7. Fenomena beban ganda (*double burden*) ibu Ina

melakukan kegiatan produksi secara optimal.

Ancaman akan kehilangan usaha akibat ditergusur oleh pemerintah kota Jakarta, karena mereka menggunakan daerah milik jalan (DAMIJA), menjadi faktor eksternal lainnya dalam pekerjaan pilihan ibu Ina dan keluarga. Waktu luang untuk bercengkerama dengan anak-anak dan suaminya secara normal tidak dimiliki ibu Ina dan keluarga. Mereka lebih mementingkan untuk bekerja dari pada istirahat dan saling berbagi suka dan duka dalam keluarga. Selain waktu luang yang tidak mereka miliki, juga ruang untuk berkumpul keluarga, ruang untuk melakukan aktifitas pribadi (MCK) tidak mereka miliki. Mereka selalu bersama dengan masyarakat miskin lainnya yang menjadi sesama PKL di wilayah tersebut. Jika keluarga ibu Ina akan melakukan aktifitas pribadi, mereka harus melakukan di MCK bersama yang telah disiapkan di rumah kontrakan mereka, yang berlokasi di kawasan permukiman kumuh kelurahan Kebon Sirih. Fenomena beban kerja ibu Ina seperti pada gambar 7.

Beban Kerja (*Double Burden*) Perempuan sebagai Pekerja Seks (PS)

Pekerjaan seks merupakan suatu fenomena beralihnya peran tubuh perempuan dari wilayah privat ke wilayah publik, yang dianggap oleh masyarakat sebagai pergeseran peran tubuh perempuan dari sakral ke berbagai aktivitas profan (Kadir 2007:148). Menurut Kadir, pemaknaan pelacur telah memenuhi prasyarat yang dimasukkan sebagai unsur kerja, karena di dalamnya terdapat unsur yang diperdagangkan, yaitu kelamin. Di mana kelamin yang dianggap privat, kini berpindah ke wilayah publik, dan disini terjadi proses pertukaran.

Pertukaran adalah suatu proses yang melibatkan transfer dari sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, nyata atau simbolik, antara dua atau lebih pelaku sosial, di mana pertukaran ini telah diterima sebagai dasar pemasaran (Mowen & Minor

2002a:14-15). Pemasaran, menurut Wroe Alderson yang dikutip dalam Mowen & Minor (2002a:14), adalah pertukaran yang terjadi antara kelompok yang mengkonsumsi dengan kelompok yang menyediakan. Dari analisis pekerjaan pilihan ketiga perempuan sebagai pekerja seks, meskipun cara melakukan prakteknya berbeda, namun memiliki beban kerja yang relatif sama bagi perempuan-perempuan tersebut, meskipun tanpa mereka sadari. Beban-beban tersebut meliputi beban faktor internal dan beban dari faktor eksternal.

Faktor-faktor Eksternal

Pekerjaan sebagai pekerja seksual merupakan suatu pekerjaan yang melibatkan pertukaran jasa dan uang. Namun, memiliki resiko-resiko sosial yang justru lebih memiskinkan perempuan miskin. Karena tidak hanya memiskinkan materi, tetapi juga memiskinkan penghargaan diri (salah satu kebutuhan dasar manusia).

Terdevaluasi

Artinya, jika mereka tidak berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, mereka akan terus tercampakkan dan akan terus menjadi barang yang hanya bernilai ekonomi dan waktu. Perempuan-perempuan ini akan terus terdevaluasi. Berdasarkan teori devaluasi, perempuan bukan dalam pengabaian kewargaanegara namun juga dalam konteks mereka dilecehkan dan dinilai rendah dalam dunia kerja, termasuk dalam kerja rumah tangga dan berbagai pelayanan dan pekerjaan dalam wilayah tenaga kerja upahan (Einstein *dalam* Agger 2008: 202).

Terasing dari pekerjaannya (dari orang lain dan diri sendiri)

Sesuai dengan teori keterasingan dari pekerjaan, maka secara fenomena, pekerjaan sebagai pekerja seks tidak lagi untuk mengembangkan melainkan mengasingkan manusia, baik dari diri sendiri maupun untuk orang lain. Di mana tanda keterasingan itu adalah kekuasaan uang,

pelacur umum, mak jomblang manusia dan bangsa-bangsa. Manusia tidak lagi bertindak demi sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri atau demi kebutuhan sesama, melainkan hanya sejauh tindakannya menghasilkan uang. Semuanya dilihat dari segi harganya. Selain terasing dari orang lain, para pekerja seks terasing dari dirinya sendiri. Di mana hasil pekerjaan seharusnya menjadi sumber perasaan bangga, seharusnya mencerminkan kecakapan pekerja, karena produk pekerjaan, namun ini tidak terjadi. Justru semakin si pekerja menghasilkan pekerjaan, semakin ia, dunia batinnya, menjadi miskin.

Ketergantungan pada orang lain (menjadi budak orang lain)

Pekerjaan merupakan suatu pelaksanaan fungsi sosial manusia, di mana manusia akan merasa berarti ketika melakukan pekerjaan, yang artinya pekerjaan tersebut membuat manusia itu semakin maju. Namun, berbeda dengan pekerjaan sebagai pekerja seks. Selain pekerjaan tersebut memiskinkan perempuan tersebut, juga menciptakan sistem perbudakan baru, melalui jalur “dukun” sebagai penyedia mantra-mantra dengan praktek ilmu gaibnya. Di mana para perempuan pekerja seks, setiap kali mereka akan membeli “mantra-mantra/guna-guna” mereka harus membayar antara Rp.300.000 – Rp. 550.000, setiap

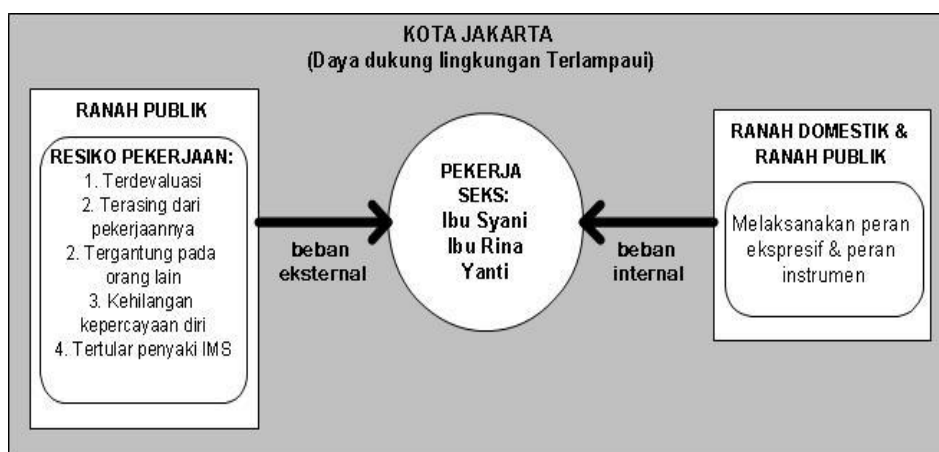
laki-laki yang akan digarap (diguna-guna). Demikian pula untuk membeli susuk (sebagai alat pesona), mereka harus membayar Rp.300.000 – Rp. 600.000, dan tergantung jenis susuknya (emas, biasa), kepada dukun tersebut.

Kehilangan kepercayaan diri

Rentan kehilangan rasa percaya diri dan cenderung merasa rendah diri. Menurut teori harga diri, bahwa: bila harga diri direndahkan, hasrat afiliasi (bergabung dengan orang lain) bertambah, dan ia akan makin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain (Elaine dalam Dayakisni & Hudainah 2001). Dengan demikian, perempuan-perempuan ini akan terus terperangkap di dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan akibat pekerjaan tersebut.

Menjadi agen penularan penyakit IMS

Karena kerja pekerja seks, memiliki unsur utama untuk ditransaksikan adalah: kelamin dan uang, di mana kelamin dianggap privat namun kemudian berpindah ke area publik. Maka, yang menjadi faktor internal bagi perempuan pekerja seks, adalah terganggunya organ reproduksi (kelamin) perempuan. Padahal, untuk melahirkan anak, perempuan harus melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebagai suatu proses reproduksi biologis. Akibat, menjadikan organ reproduksi sebagai unsur pemasaran,



Gambar 8. Fenomena Beban Kerja (*Double Burden*) Perempuan Pekerja Seks

maka organ ini diperbolehkan untuk digunakan secara publik. Disinilah konflik internal terjadi. Perempuan tidak menyadari bahwa menjaga organ reproduksi merupakan hak-haknya bukan suatu kewajiban. Hak-hak perempuan menjadi terganggu ketika organ reproduksi ini menjadi terganggu kesehatannya, misalnya terkena penyakit infeksi menular seksual (IMS). Penyakit-penyakit IMS, seperti: GO atau kencing nanah, Klamenia, herpes kelamin, sipilis atau raja singa, jengger ayam, hepatitis dan HIV/AIDS. Penyakit-penyakit ini hanya ada dikelamin dan dapat ditularkan melalui hubungan seks, yang artinya, penyakit IMS dapat disebarkan ke seluruh masyarakat yang sering melakukan transaksi kelamin. Penyakit-penyakit tersebut dapat mengakibatkan kemandulan, keguguran, kanker leher rahim, rusaknya penglihatan, otak dan hati, mudah tertular HIV, hepatitis B dan akhirnya menyebabkan kematian (Jurnal Perempuan 53:35).

Dari laporan situasi HIV/AIDS di Indonesia yang dilaporkan dalam "Usaha Pencapaian MDGs di Indonesia" pada Maret 2008, di kemukakan bahwa sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya HIV terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan. Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kelompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan yang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderungan seperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010.

Faktor eksternal yang diterima dari ranah publik ditambah dengan faktor internal yang diterima dari ranah domestik, di mana

kedua faktor ini sangat memberikan penderitaan bagi ketiga perempuan pekerja seks tersebut (Gambar 8), meskipun seringkali mereka tidak menyadarinya. Ini disebabkan, karena mereka sangat kekurangan pemahaman akan arti dari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia yang berfungsi sebagai individu dan manusia yang memiliki fungsi sosial. Beban kerja (*double burden*) pada perempuan miskin pekerja seks berbeda dengan beban kerja pada perempuan miskin bukan pekerja seks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ternyata perempuan-perempuan miskin (sebagai pekerja maupun bekerja sendiri) lebih berat memikul beban kemiskinan dibandingkan laki-laki miskin. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa fenomena beban kerja perempuan dan laki-laki miskin adalah penjumlahan dari beban eksternal dan beban internal. Beban eksternal adalah beban yang dipengaruhi oleh sistem pengupahan, resiko pekerjaan dan mekanisme kerja bagi perempuan-perempuan miskin yang menjadi pekerja (bagi pramuwisma, pekerja pub & bar) ditambah dengan beban internal, yaitu pembagian waktu kerja antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Di mana beban internal (pembagian waktu kerja), Sedangkan, beban eksternal bagi perempuan yang bekerja sendiri (*self employment*), adalah resiko pekerjaan selama bekerja di ranah publik (seperti PKL), di mana tidak memiliki lahan dan lokasi bagi perempuan untuk melakukan kegiatan aktifitas di ruang publik. Beban ini ditambah dengan beban internal, yaitu pembagian waktu kerja antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Di mana kedua beban ini sangat dipengaruhi oleh ideologi patriarki, yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang didasari oleh interpretasi terhadap perempuan oleh ahli-ahli agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Megawangi, R. 1999. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Penerbit Mizan. Bandung.
- Widanti 2005:410) Widanti. A. 2005. Hukum Berkeadilan Jender. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Agger 2008:207). Agger, B. 2008. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Terj dari *Critical Social Theory: An Introduction* oleh Nurhadi. Kreasi Wacana. Yogyakarta (436 hlm).
- Young & Mack dalam Horton & Hunt 1984:121) Young, K.K. 2006. *Hindu, Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*. Terj.dari *Women in World Religion*, oleh Ade Halimah. SUKA-Press. Yogyakarta.
- Ollenburger & Moore (2002:119), Ollenburger, J.C & H.A. Moore. 2002. *Sosiologi Wanita*. Terj. dari *A Sociology of Women* oleh Budi Sucahyono & Yan Sumaryana. PT. Rineka Cipta. Jakarta (298 hlm).
- Sajogjo (1983) Sajogjo, P. 1983. Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa. Penerbit CV Rajawali. Jakarta (379 hlm).
- Soetaryono Retno. 1985. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Kerusakan Sos-Ek – Suatu Studi kasus di Kecamatan Jatiujung Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Jakarta. Tesis Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Ekologi Manusia. Tidak Dipublikasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sari (2004) Sari, D.I. 2004. Hak-hak Sosial Ekonomi Buruh Perempuan. Edisi I No.4 Desember 2004
- Westy 2008). Westy, A. 2008. Kerelawanan: Pilar Pemberdayaan Perempuan yang Semakin Kokoh. Jurnal Galang Vol. 3 No. 1, Pebruari 2008.
- Murray 1995:53). Muray, J.A. 1994. *Pedagang Jalanan dan Pelacuran Jakarta*. Terj. Dari *No Money, No Honey, a study a streed traders and prostitutes in Jakarta* diterjemahkan. oleh Nasyith Majidi. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Dewayanti, R. Strategi Adaptasi Perempuan: Persoalan Ekonomi dan Upaya Pengorganisasian. hal 77-90.
- Resmi Setia M.S 2003). Resmi Setia, M.S. 2003. Perjalanan Seorang Buruh Perempuan: Antara Rumah Tangga, Tempat Kerja dan Komunitas. Jurnal Analisis Sosial Vol.8 No.2 Oktober 2003. Yayasan Akatiga. Bandung (hal 51-63).
- Kadir 2007:148). Kadir, H.A. 2007. Tangan Kuasa Dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia. INSISTPress. Yogyakarta (309 hlm).
- Mowen & Minor (2002a:14), Mowen, J.C & M. Minor. 2002. Perilaku Konsumen. Jilid 2 Edisi Kelima. Terj. dari *Consumer Behaviour, 5th Ed*. Oleh Dr. Dwi Kartini Yahya, S.E., Spec.,Lic. PT. Penerbit Erlangga. Jakarta. (432 hlm).
- Teune 1988:39) Teune, H. 1988. *Growth*. Volume 167 Sage Library of Social Research. London
- Todaro (1994) Todaro, M. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terj.dari *Economic Development in The Third World Fourth Edition*, oleh Ir. Burhanuddin Abdulla, M.A. Penerbit Erlangga. Jakarta. (378 hlm)
- Keats D. 2004. *The Meaning of Development, Sustainable Development and Rural Development*. South Africa. NetTel@Africa Off-Line. <http://elearn.nettelafrika.org/>